

Abstrak

Berdasarkan ketentuan fiqh, seorang ayah dibebani oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi hak untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Berdasarkan ketentuan hukum positif, nafkah anak merupakan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh ayah. Apabila ayah tidak memenuhi nafkah yang merupakan hak anak tersebut maka telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah meninggalkan kewajibannya. Melalui penelitian disertasi ini setidaknya-tidaknya dapat memberikan kontribusi kepada pembuat kebijakan dengan menawarkan solusi alternatif dalam rangka ikut menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang terjadi pasca perceraian.

Penelitian ini merupakan studi putusan dengan pengkajian analisisnya berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang mengacu ketentuan fiqh dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian berupa pengintegrasian metode deduktif dan induktif. Selanjutnya analisis dilakukan dengan pola penalaran *istishlahiyyah*. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Deskriptif yaitu memusatkan diri dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.

Dalam disertasi ini penelitian mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau yang dinilai tidak tegas, bahkan kurang berani melakukan pengembangan hukum dalam kondisi kekinian, dan terjadinya perbedaan antara rumusan amar hakim yang satu dengan hakim lainnya, serta tidak adanya standar batas nafkah terendah dan umur dewasa anak, sehingga ikut mempengaruhi tidak terlaksananya kewajiban ayah untuk menafkahi anak kandungnya pasca terjadinya perceraian.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anaknya adalah sampai usia anak mencapai 25 tahun disebabkan karena kondisi kekinian. Karena pada usia 22 tahun, pada umumnya telah menyelesaikan strata satu. Maka setidaknya diperlukan waktu dua atau tiga tahun untuk persiapan mencari pekerjaan guna membiayai hidupnya sebelum benar-benar hidup mandiri. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia umumnya membatasi calon karyawan barunya pada usia 25 tahun, disamping itu juga batas nafkah terendah bagi seorang anak tanpa melihat pekerjaan dan penghasilan ayah (kecuali dalam kondisi sakit dan tidak bisa bekerja) sebagai salah satu tujuan kemasalahatan yakni untuk memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), disamping amar putusan hakim Pengadilan Agama yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara tegas dan berbeda antara amar putusan hakim yang satu dengan hakim lainnya sehingga hal tersebut ikut mempengaruhi tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstact

Based on the terms of fiqh, a father is burdened by law to provide for his child. For a child, the living becomes the right to have for the sake of fulfilling life. Based on the provisions of positive law, the child's living is the legal consequence that must be fulfilled by the father. If the father does not fulfill the child's livelihood, then it has been considered to be unlawful because he has abandoned his duty. Through this dissertation research at least can contribute to policy makers by offering alternative solutions in order to participate in solving child livelihood problems that occur post-divorce.

This research is a study of decision with the analysis of the analysis based on library research (Library Research) is a study whose study was carried out by tracing the various literatures relevant to the subject, such as books, notes, or research reports from previous research which refers to the provisions of fiqh and positive law of Indonesia . The method used in the study is the integration of deductive and inductive methods. Further analysis is done with istishlahiyyah reasoning pattern. This research is descriptive, analytic, and comparative. Descriptive that is focusing themselves by describing and describing the object of research in a systematic.

In this dissertation, the research describes and analyzes the judgment of Religious Court Judges of the Religious Court of Riau High Court which is considered unequivocal, even less daring to develop law in the present condition, and the difference between the formulation of the judge with one judge and the absence of standard the lowest livelihood limit and the adult age of the child, thereby influencing the unfailing duty of the father to support his / her child after the divorce.

The results of this dissertation research indicate that the limit of the livelihood of parents to their children is until the age of children reaching 25 years due to the present condition. Because at the age of 22 years, generally have completed strata one. It will take at least two or three years to prepare for a job to finance his life before actually living independently. In addition, companies in Indonesia generally limit their new employee candidates at the age of 25, in addition to the lowest livelihoods for a child regardless of job and income of the father (except in conditions of illness and can not work) as one of the goals of mashlahat namely to care for the soul (hifzu al-nafs), in addition to the judgment of the judges of the Religious Courts which do not give a clear legal consideration and different between the judgment of one judge with another judge so that it also affects the unimplemented livelihood of children after the divorce.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

بموجب أحكام الفقه ، يتحمل الأب عبء توفير القانون لابنه. للطفل ، يصبح الحي الحق في أن يكون من أجل تحقيق حياته. وبموجب أحكام القانون الوضعي ، فإن معيشة الطفل هي النتيجة القانونية التي يجب أن يحققها الأب. إذا لم يحقق الأب مصدر رزق الطفل، فقد اعتُبر غير قانوني لأنه تخلى عن واجبه. من خلال أبحاث الأطروحة هذه على الأقل ، يمكن أن تساهم في صانعي السياسات من خلال تقديم حلول بديلة من أجل المشاركة في حل مشكلات معيشة الأطفال التي تحدث بعد الطلاق.

هذا البحث عبارة عن دراسة للقرار مع تحليل التحليل المستند إلى أبحاث المكتبة (بحث بالمكتبة) وهي دراسة أجريت من خلال دراسة الآداب المتنوعة ذات الصلة بالموضوع ، مثل الكتب والمذكرات أو التقارير البحثية من بحث سابق والتي تشير إلى أحكام الفقه وقانون إندونيسيا الإيجابي. ، الطريقة المستخدمة في الدراسة هي تكامل الأساليب الاستنتاجية والاستقرائية. يتم إجراء مزيد من التحليل مع نمط الاستدلال الاستدلالية. هذا البحث هو وصفي، تحليلي، ومقارن. وصفية تركز على نفسها من خلال وصف ووصف موضوع البحث بطريقة منهجية.

في هذه الرسالة، يصف البحث ويحلل حكم قضاة المحكمة الدينية في المحكمة الدينية لمحكمة رياو العليا التي تعتبر غير قاطعة، حتى أقل جراءة لتطوير القانون في ظل الوضع الحالي ، والفرق بين صياغة القاضي مع قاض واحد وغياب المعيار الحد الأدنى لسبل العيش وعمر الطفل البالغ ، مما يؤثر على واجب الأب الذي لا ينقصه دعم طفله بعد الطلاق.

وتشير هذه النتائج بحث أطروحة أن الحد من الآباء والأمهات الدخل المسؤولية لأطفالهم من خلال يبلغ الطفل 25 سنة من العمر بسبب الوضع الحالي. لأنه في سن 22 عاما، في عام، وقد أنجزت المرحلة الجامعية. فعلى الأقل تأخذ سنتين أو ثلاث سنوات للتحضير لإيجاد وظيفة لدفع ثمن حياته قبل فعلا العيش بصورة مستقلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي هي في إندونيسيا تقييد عموما الموظفين الجدد المحتملين في سن 25 عاما، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحد من غرفة المعيشة الخاصة بهم للطفل دون رؤية وظائف والآباء الدخل (إلا في ظروف الأمل ولا يمكن أن تعمل) باعتبارها واحدة من الأهداف للمصلحة وهي للحفاظ على الروح (سورة حفظ النفس)، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن المحاكم القاضي التي لا توفر الاعتبارات القانونية البحثية ويختلف عن الحكم الصادر عن قاض واحد من قضاة آخرين بحيث لا تؤثر على تطبيق النفقة للطفل بعد طلاق والديه.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.